

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi dan naiknya harga barang-barang serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari luar negeri akan semakin dikurangi.

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama setiap negara di dunia. Tentu keberadaan pajak sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan. Di negara-negara maju dan berkembang, sebagian potensi pendapatan negara melalui pajak itu sudah dimanfaatkan bagi keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi badan usaha dan industri nasional mereka. Sebagaimana dimaklumi, pajak berfungsi dalam pembiayaan (*budgeter*) pembangunan, terutama untuk keperluan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, barang, termasuk pemeliharaannya.

Dengan pajak, roda pembangunan dapat berjalan dan membuka kesempatan kerja. Dalam hal ini pajak juga berfungsi sebagai pendistribusi pendapatan masyarakat. Dengan pajak, suatu pemerintahan juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitasi harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap dijaga. Stabilitasi dilakukan dengan mengatur peredaran uang, yang dilakukan melalui pemungutan pajak dan dengan pemanfaatannya secara efektif dan efisien.

Penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam dan luar negeri. Penerimaan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, karena disamping cepat dan rendah biayanya, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar potensinya. Sistem pemungutan pajak suatu negara baik *Self Assessment* maupun *Official Assessment* sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dana pemerintahan tersebut.

Dalam sistem penerimaan negara, pajak mempunyai dua fungsi yang melekat dalam sistem perpajakan yaitu :

1. Fungsi budgetair, yaitu fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Fungsi ini pada hakekatnya merupakan fungsi utama sebagaimana batasan yang diberikan para ahli. Pada beberapa negara berkembang terlihat indikasi kuat bahwa penggunaan dana yang diperoleh melalui pajak tidak hanya diperuntukan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu maka sasaran utama dalam pemungutan pajak adalah penerimaan kas negara.
2. Fungsi mengatur, dimana dengan fungsi ini diharapkan sistem perpajakan yang diterapkan tidak akan menimbulkan pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Pajak digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dan bila perlu merubah susunan pendapatan dan kekayaan negara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung pada awalnya merupakan kantor dinas luar pajak tingkat I Teluk Betung yang berada dibawah wewenang Kantor Inspeksi Keuangan Palembang, pada tanggal 13 Januari 1964 secara resmi statusnya dinaikkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Palembang yang membawahi Kantor Dinas Luar Tingkat Teluk Betung. Seiring dengan perubahan status keresidenan Lampung menjadi Provinsi Lampung, dan pada tahun 1966 dilakukan perubahan menjadi kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung.

Sejalan dengan perubahan sistem perpajakan nasional di tahun 1984 dimana prinsip pemungutan pajak dalam Undang-undang perpajakan yang semula *official*

assessment yang dirubah menjadi *self assessment*, maka pada tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung.

Sebelum kantor pelayanan pajak pratama Teluk Betung, Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung terletak di jalan Dr. Susilo No.19 Teluk Betung Bandar Lampung, tetapi sejak tanggal 9 September 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipecah menjadi 4, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Salah satunya di daerah Teluk Betung tepatnya di Jl. P. Emir M. Noer no. 5A yang sampai sekarang terkenal dengan sebutan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung.

Sebelum KPP Pratama Teluk Betung menempati gedung yang berada sekarang ini KPP Pratama Teluk Betung terletak di Jl. Yos Sudarso No.244 Sukaraja, Teluk Betung berdirilah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu Dan Lampung yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung.

Dengan lahirnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu Dan Lampung inilah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, selain itu sebagai imbal baliknya pihak Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelayanan yang istimewa, mulai dari pemantauan perkembangan

usaha, konsultasi perpajakan dan penyampaian atau pelaporan SPT nya dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak itu sendiri. meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak dan memudahkan pengawasan pelaksanaan tugas.

Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak yang telah menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak yang terutang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Surat Pemberitahuan ini sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Di samping itu juga untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, Harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan dalam UU PPh 1984 yang telah dirubah untuk ketiga kali nya dengan UU No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan tidak hanya berfungsi sebagai data saja, tetapi merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

Dalam Rencana Laporan ini, penulis akan melakukan tinjauan atas pelaksanaan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan atas kewajibannya menyampaikan kegiatan usahanya dalam kurun waktu satu tahun,

melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan Tahunan. Selain itu juga akan mengkaji masalah-masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan langkah-langkah yang mungkin diambil dalam mengatasi masalah tersebut.

Atas dasar hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan ini sebagai obyek dan potensi yang besar dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh sebab itu, penulis membahasnya dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini yang berjudul "Tinjauan Atas Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dan Peranannya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Teluk Betung."

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana Tinjauan Atas Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Peranannya Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung,

2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan penerimaan Pajak Penghasilan Badan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung,
3. Mencoba memberikan sumbangan pemikiran yang mungkin berguna dalam mengatasi masalah yang dihadapi KPP Pratama Teluk Betung dalam pengawasan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan,
4. Menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyampaian Surat Pemberitahuan tersebut sebagai bekal ketika terjun langsung ke dunia kerja.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan data yang penulis telah dapatkan untuk menyusun laporan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah dengan tujuan agar dapat lebih fokus dalam membahas masalah dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang luas serta mempertajam analisis.

Penulisan laporan ini mengacu kepada pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan oleh Wajib Pajak dan peranannya terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan sebagai dasar penyusunan laporan, penulis merencanakan pengumpulan data-data dengan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menyimpulkan uraian yang terdapat pada literatur seperti Undang-undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan baik Menteri Keuangan maupun Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran, buku perpajakan serta referensi lainnya yang berhubungan dan dapat dijadikan dasar penyusunan laporan.

2. Studi Lapangan

Terdiri dari dua metode yaitu :

- a. Metode Wawancara, yaitu melakukan wawancara mengenai materi yang diteliti kepada pihak-pihak yang berkaitan,
- b. Metode Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika

BAB II LANDASAN TEORI, DATA, DAN FAKTA

Berisi uraian tentang landasan konsep yang akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan secara umum yang mencakup pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan, fungsi Surat Pemberitahuan, dasar hukum, serta data dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Teluk Betung, permasalahan yang dihadapi, serta alternatif pemecahannya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa simpulan yang penting dari semua uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu